



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 10 Cililitan, Jakarta Timur 13640  
Telp. 021- 8091908, Faks. 021-8002265/8011753 Website: bphn.go.id

Nomor : PHN-HN.04.03-854 21 Desember 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Perpanjangan Pendaftaran *Paralegal Justice Award 2024*

Yth.

1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di tempat

Menyusuli surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional perihal Seleksi Anugerah *Paralegal Justice Award 2024* bagi Kepala Desa/Lurah dan mempertimbangkan antusiasme pendaftar serta memberi kesempatan kepada lebih banyak Kepala Desa/Lurah untuk mengikuti pendaftaran, maka pendaftaran *Paralegal Justice Award 2024* yang semula berakhir tanggal 31 Desember 2023 diperpanjang menjadi **31 Januari 2024**.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia dapat melakukan koordinasi di masing-masing wilayah agar seluruh Kepala Desa/Lurah mengikuti *Paralegal Justice Award 2024* serta selanjutnya bersama-sama melakukan Seleksi Daerah dengan melibatkan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri merujuk pada Pedoman Teknis *Paralegal Justice Award 2024*. Pendaftaran dan seleksi *Paralegal Justice Award 2024* dilakukan melalui Aplikasi PJA ([pja.bphn.go.id](http://pja.bphn.go.id)) dengan jadwal sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

Tembusan Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia;
7. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia;
9. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
10. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

